

Laporan Terdisposisi - KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

☆☆☆☆☆0

LIHAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

Kelola

Terdisposisi

Arsip

Terlempar

Salinan

Selesai

Terpilih

Sukses

Laporan Terpilih & Sukses

Riwayat Permintaan

Permintaan Arsipkan

Social Media (BETA)

BUAT LAPORAN

Form Manual

Laporan Terdisposisi - KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Belum Ditindaklanjuti0

Sedang Diproses0

Selesai2

tracking id / isi / pelapor

Pencarian Lebih Lanjut • Urutkan dari perubahan (baru ke lama) • Tampilkan 10 •

Anonim

Rahasia

22 Jul 2024, 03:54

Website

Ditutup oleh Sistem

20 Agu 2024, 17:05

Belum dinilai pelapor

Terdisposisi : KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Dugaan Melempar Uang Ke Jaksa (Mejelekan Kejaksaan) & Korupsi Dana Bos Sekolah Smkn 2 RI

Yth. pimpinan kajari rejang lebong
berikut kami sampaikan dugaan korupsi yg merugikan apbn / APBD pada smkn 2 rejang lebong .

Selengkapnya

SP4N-LAPOR!

#8000422

Tindak Lanjut 4

Komentar 0

Lainnya •

Rizki Saspama Gunawan

Rahasia

26 Jan 2022, 16:22

Website - kejaksaan-agung-republik-indonesia

Ditutup oleh Sistem

15 Agu 2022, 11:08

Belum dinilai pelapor

Terdisposisi : KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Permintaan Cek Psikologi Tahanan Kejaksaan

Selamat pagi pak, saya melaporkan kepada kejaksaan agung RI, bahwa ahmad yusuf harahap yang saat ini menjalani sidang di pengadilan negeri curup, rejang lebong, Bengkulu dalam kasus narkoba. saya mohon pak, untuk mengecek keadaan ahmad yusuf harahap, karena menurut kami sebagai keluarga dan juga tetangga, beliau mengalami gangguan jiwa. jadi, sebelum ada putusan sidang, mohon untuk dicek terlebih dahulu. saya mohon pak

HUKUM

#5942718

Tindak Lanjut 2

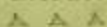
Komentar 0

Lainnya •

Telah selesai dilakukan tindaklanjut

Telah selesai dilakukan tindaklanjut

DATUN



KEJAKSAAN NEGERI
REJANG LEBONG

RESTO YANKUM
(Restoran, Pelayanan Hukum)



KONSULTASI

- PERKARA
- PERKARA
- PERKARA
MENJADI RESTO YANKUM

MEMBERIKAN
KONSULTASI DAN MELAKSANAKAN
PELAYANAN HUKUM
GRATIS





DOKUMENTASI KONSULTASI

Konsultasi Pelayanan Hukum (Jumat 15 Agustus 2025)



Pengaduan : Terkait Proses Pemecahan Sertipikat Tanah dan Bangunannya

- Tahun 2020 saya mengurus sertifikat rumah dan sudah DP Notaris setengah harga dari kesepakatan. Tapi sudah 1 tahun belum selesai, bahkan AJB saja belum. Alasannya pembuatansplitpengukuran memang lama. Pertanyaannya, berapa lama proses normal dari waktu pengukuran sampaisplitpengukuran selesai? Berapa lama AJB selesai?

Tindak Lanjut yang diberikan oleh JPN Bidang Datun DANDI SATYA PERMANA, S.H yaitu berupa penjelasan terkait pengaduan dari masyarakat tersebut bahwa :

- Pertama-tama kami asumsikan pembelian rumah itu meliputi tanahnya, di mana dilakukan perubahan data pendaftaran tanah dengan akta tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") yaitu salah satunya dengan Akta Jual Beli ("AJB"), patut dipahami, proses pengukuran tanah adalah proses untuk menentukan data seperti batas-batas, lokasi serta luas atas suatu bidang tanah, Adapun proses pengukuran tanah adalah bagian dari tahapan-tahapan proses pembuatan sertifikat hak atas tanah yang dimohonkan langsung kepada kantor pertanahan di wilayah setempat atau melalui Notaris/PPAT.
- Mengenai *split* yang dimaksud kami asumsikan adalah pemecahan sertipikat. Sehingga hanya sebagian luas tanah yang dimohonkan sertipikat, maka lamanya proses ini dikarenakan harus menyamakan batas-batas di lokasi dengan batas-batas tanah bagian timur, barat, utara dan selatan. Mengenai jangka waktu proses pemecahan sertipikat ini

tidak dapat dipastikan, sebab pemeriksaan atas dokumen dan pengukuran data fisik tanah memerlukan waktu dan berikut proses-proses selanjutnya. Namun dalam praktik, biasanya proses pemecahan sertifikat diselesaikan dalam jangka waktu kurang lebih 4 bulan.

- *Splitzing* atau pemecahan dalam sertifikat hak atas tanah merupakan proses pemecahan satu sertifikat menjadi beberapa sertifikat hak atas tanah yang baru. Lalu apakah bangunan dapat diberlakukan *splitzing*? Menurut hemat kami, sebagaimana hak atas tanah tidak dapat dipisahkan dengan bangunan yang berada di atasnya, sehingga hal tersebut memungkinkan jika terdapat suatu perbuatan hukum terhadap tanah tersebut selama bangunan yang dimaksud secara fisik merupakan satu kesatuan dengan tanahnya.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

Jalan Basuki Rahmat No. 09 Kel. Dwi Tunggal Kec. Curup Kab. Rejang Lebong Bengkulu
Telp/Fax : 0732 – 21599 Kode Pos : 39112 Website : kejari-rejanglebong.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
Nomor: Kep-02/L.7.11/Dsb/01/2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGHUBUNG PELAKSANA
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) –
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) TAHUN 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan pengaduan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan Masyarakat, akan digunakan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikelola oleh Pejabat Penghubung;
 - c. Bahwa untuk menetapkan Pejabat Penghubung dalam pengelolaan penduan menggunakan aplikasi di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-



006/A/JA/07/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 10. Instruksi Jaksa Agung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif Mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial;
- 11. Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-001/A/JA/06/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
- 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- 13. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-348/C/Cr.5/12/2018 perihal Petunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Menetapkan : PEJABAT PENGHUBUNG PELAKSANA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) – LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat namanya tersebut seperti pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Penghubung Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Tahun 2025.

KEDUA : Melaksanakan tugas-tugas sebagai Pejabat Penghubung Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).



- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pejabat Penghubung Pelaksana Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab secara teknis dan administrasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan Di : Curup
Pada Tanggal : 20 Januari 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



Fransisco Tarigan, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19800503 200212 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Arsip.



Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Nomor : Kep-02/L.7.11/Dsb/01/2025
Tanggal : 20 Januari 2025

No.	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	No. TELEPON	ALAMAT EMAIL
1.	Hendra Mubarak, S.H. Jaksa Muda (III/d) 19830704 200912 1 003	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rejang Lebong	0813-7919-4746	hendra.mubarak @kejaksaan.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



Fransisco Tarigan, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19800503 200212 1 001







PENGADUAN MASYARAKAT

PENGADUAN MASYARAKAT

robertosihombing.official@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

NAMA LENGKAP *

Your answer

EMAIL *

Your answer

NO. HP/TELP.

Your answer

ALAMAT LENGKAP *

Your answer

JUDUL PENGADUAN *

Your answer

ISI PENGADUAN MASYARAKAT (Jelaskan secara rinci. Silahkan uraikan mengenai dugaan pelanggaran, siapa yang diduga terlibat, di instansi mana terjadi, dan kapan terjadinya peristiwa tersebut.) *

Your answer

Submit

Clear form



LAPORKAN KORUPSI

Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan oleh seseorang yang Anda kenal?

Untuk Anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena kebetulan Anda mengenal pelaku, misal atasan atau teman kerja, Anda dapat menggunakan sistem ini.

Anda dapat melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Tidak perlu takut identitas Anda akan terungkap karena Kejaksaan akan menjamin identitas Anda. Jadilah whistleblower bagi Kejaksaan!

robertosihombing.official@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

NAMA LENGKAP (Identitas anda kami rahasiakan) *

Your answer

EMAIL. (Identitas anda kami rahasiakan) *

Your answer

NO. HP/TELP. (Identitas anda kami rahasiakan)

Your answer

ALAMAT LENGKAP (Identitas anda kami rahasiakan) *

Your answer

JUDUL PENGADUAN *

Your answer

ISI PENGADUAN KORUPSI (Jelaskan secara rinci. Silahkan uraikan mengenai dugaan



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



BANER-BANNER TENTANG HIMBAUAN ANTI SUAP
MENYUAP.



KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



Publikasi ANTI KORPSI di
sarana media online

KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



WHISTLE BLOWING SYSTEM

ADIK SANAK SEGALO,
LAPORKAN KALU ADIK
SANAK ADO DENGAR DAN
NENGOK PELANGGARAN
YANG PELAKUNYO
PEJABAT/PEGAWAI DI
LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI
REJANG LEBONG

LAPORKAN KE:



0811 1300 8653



kejari-rejanglebong@gmail



@kejarirejanglebong



KEJAKSAAN NEGERI
REJANG LEBONG



KEJARI REJANG LEBONG

PELAPOR DIJAMIN DAN
DILINDUNGI KERAHASIAAN
IDENTITASNYA

